

ARTIKEL PENELITIAN DOSEN MUDA (BBI)
TAHUN ANGGARAN 2006



POTRET 3 DESA TRANSMIGRASI ORANG JAWA :

Studi Kasus di Desa Tongar, Koja dan Desa Baru

Pasaman Sumatera Barat

Oleh :

Dra. Eni May, M. Si.

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian

Nomor : 005/SP3/PP/DP2M/II/2006

Tanggal 1 Februari 2006

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG,
SEPTEMBER 2006

Latar Belakang Masalah

Lelaki tua, dengan usia hampir mendekati 100 tahun itu masih kuat mencangkul tanah. Mbah Paijo, begitu orang-orang Desa Baru memanggilnya juga masih memiliki pendengaran dan ingatan yang kuat. Ketika ditanyakan kapan dan bagaimana ia sampai di Desa Baru, dengan lancar pun ia bercerita. Walaupun bahasa Indonesianya bercampur bahasa Jawa dan kadangkala masuk juga istilah Batak dan Minangkabau, namun dengan lancar ia katakan bahwa ia merupakan keturunan pertama dari orang Jawa yang transmigrasi ke Desa Baru. Dulu Desa Baru ini merupakan rimba besar yang dipenuhi oleh kayu-kayu besar. Di Sela-sela kayu itu penuh dengan duri-duri salak liar. Sedikit demi sedikit, kayu besar kami tebangi dan duri salak kami singkirkan secara bergotong royong. Lebih kurang 3 tahun, rimba tadi baru dapat kami tanami, itupun hanya 1/2 sampai 1 hektar tiap kepala keluarga.

Kehadiran kami disini tidak terlepas dari ajakan Belanda. Belanda menjanjikan, bagi siapa yang mau bekerja, maka akan dapat tanah di Sumatera. Kami yang datang umumnya berasal keluarga miskin di Jawa, sehingga ketika dijanjikan tanah, maka banyak yang berminat. Rombongan pertama ke Desa baru ini mencapai 80 keluarga. Memang, sesampikannya di Desa baru, kami mendapatkan tanah yang dijanjikan. Namun, tanah yang kami dapatkan bukanlah tanah yang siap ditanami, akan tetapi merupakan rimba raya, yang harus diakhutkan terlebih dahulu. (Wawancara dengan Mbah Paijo).

Tidak jauh berbeda dengan Desa baru, di Tongar dan Kinali kondisi tanah yang diberikan oleh pemerintah Belanda pada transmigrasi juga sama saja. Tanah yang dijanjikan merupakan hutan-hutan besar di pedalaman Pasaman Sumatera itulah yang diberikan kepada para transmigrasi, sehingga tahun pertama sampai ketiga, kerja mereka hanyalah menebangi kayu-kayu yang besarnya mencapai sebuah 10 sampai 15 meter. Dalam konteks inilah, penelitian ini mengkaji tranmigrasi di Indonesia.

Pada prinsipnya, Penyelenggaraan transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup. Melihat sasaran dari transmigrasi, maka secara umum dapat dikatakan bahwa transmigrasi adalah pemindahan penduduk. Selanjutnya hasil dari pemindahan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari peserta transmigrasi (Aziz dan Nugroho, 1985).

Program pemindahan penduduk di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1905, ketika 155 keluarga petani dari Kedu dipindahkan ke Gedong Tataan di Lampung. Pemindahan penduduk masa Hindia Belanda dikenal dengan istilah transmigrasi. Transmigrasi ini lazimnya untuk menyebut pemindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, sedangkan pemindahan dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa disebut *Kolonisasi*.

Pada masa setelah kemerdekaan, pemindahan penduduk dari Pulau Jawa dan di Jawa sendiri disebut dengan istilah transmigrasi. Ada persamaan antara penyelenggaraan pemindahan penduduk pada masa kolonial dan setelah kemerdekaan yaitu untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan pengentasan kemiskinan. Akan tetapi tujuan dari keduanya saling berbeda. Kolonisasi kebanyakan diselenggarakan untuk mendapatkan tenaga kerja murah bagi perusahaan swasta di luar Jawa, sedangkan program transmigrasi diselenggarakan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan di luar Jawa. Pada masa Kolonial Belanda hasilnya adalah untuk mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya yang diperoleh dari usaha dan kerja keras buruh yang dibayar dengan murah.

Ide kolonisasi bermula dari keyakinan tentang adanya kelebihan penduduk di pulau Jawa. Itulah yang sering terdengar dari kalangan pemerintah kolonial ataupun kalangan lainnya. Program kolonisasi ini dimulai saat pemerintah kolonial memperkenalkan kebijakan baru yang disebut Politik Etis, yang meliputi pendidikan, irigasi dan emigrasi. Dari hal ini, maka dimulailah program kolonisasi yang digembarkankan pada waktu itu yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat (Joan, 1982).

Setelah kemerdekaan, program pemindahan penduduk dari Jawa yang telah dimulai oleh pemerintah kolonial diteruskan oleh pemerintah Indonesia, namanya diganti menjadi transmigrasi. Selama tahun lima puluhan dan tahun-tahun pertama enam puluhan, aspek demografis masih diutamakan dengan harapan kepadatan penduduk dapat dikurangi, terutama di daerah pedesaan. Daerah tujuan transmigrasi umumnya adalah pulau Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera, transmigran banyak di daerah Lampung, Sumatera Timur, dan Sumatera Barat (Swasono, 1985).

Program transmigrasi ke Sumatera Barat telah terjadi sejak tahun 1936. Orang Jawa yang datang ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Ophir Kinali. (Ashfahrizal, 1996). Pada tahun 1941, didatangkan lagi orang Jawa dari Jawa Timur untuk menempati daerah baru di Pasaman. Mereka ditempatkan di daerah Batahan, di desa yang bernama Baharoe. (Bulletin Kolonisasi, 1939)

Pada masa setelah Indonesia merdeka orang Jawa kembali didatangkan ke Pasaman. Pada tahun 1954-1956 transmigrasi Jawa datang ditempatkan di Desa Baru. Selain itu juga terdapat transmigran Jawa dari Suriname. Pada mulanya mereka bekerja di perkebunan milik orang Belanda di Suriname (Amerika Selatan). (Koriun, 1998, setelah Suriname merdeka, mereka memilih kembali ke Indonesia dan oleh pemerintah Indonesia mereka ditempatkan di Tongar (Pasaman). Pada tahun 1963 didatangkan pula transmigran ke Kinali. (Syafaruddin, 1995).

Sampai dengan masa Orde Baru, kabupaten Pasaman masih merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi. Selama Pelita IV-VI (1986-1997) telah dibuka daerah transmigrasi di daerah Sungai Aur, Parit, Parilontiang dan Bukit Malintang. (Buku Data Edisi Nopember 1998 Departemen Transmigrasi)

Program tranmigrasi yang telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda sampai masa Orde Baru telah banyak menghasilkan desa-desa transmigrasi di Kabupaten Pasaman. Kehidupan di desa-desa transmigrasi ini mengalami turun naik sejalan dengan terjadi peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1942 sampai 1965. Pada masa awal pemerintahan Orde Baru (tahun 1967, desa-desa transmigrasi di Kabupaten Pasaman mengalami trauma politik dari PKI.

Terlepas dari penilaian orang terhadap kebijaksanaan transmigrasi sebagai usaha menaikkan taraf hidup, kenyataan yang pasti kebijakan itu pernah ada di Indonesia yaitu sejak awal abad 20 semasa pemerintahan Hindia Belanda dan kebijaksanaan tersebut hingga sekarang masih menjadi pemikiran yang utama bagi pemerintah Indonesia.

Kajian ini selain memperkuat dan memperdalam hasil penelitian sebelumnya, juga akan memberikan masukan-masukan, temuan-temuan baru tentang transmigrasi di kabupaten Pasaman. Penelitian ini dirancang dengan melihat kasus-kasus transmigrasi di beberapa desa di Pasaman. Permasalahan pokok yang dilihat adalah masalah pengentasan kemiskinan. Bagaimanakah usaha pemerintah, dan transmigran sendiri untuk lepas dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu penelitian ini juga melihat berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan transmigrasi.

Perumusan Masalah

Berbagai skenario dalam transmigrasi dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Namun tidak selamanya misi berjalan lancar, karena bayangan kegagalan harus diperhitungkan oleh petani. Mereka harus mempersiapkan strategi khusus dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya.

Strategi ini bisa bersifat tradisional maupun modern. Dapat dikatakan banyak petani yang mengikuti program transmigrasi tetap dalam kategori miskin. Gambaran ini menunjukkan bahwa program transmigrasi yang diasumsikan mampu mengentaskan kemiskinan, dalam pelaksanaannya ternyata belum.

Merujuk gambaran diatas, penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan proses pertumbuhan di desa transmigrasi itu, dengan menggunakan pendekatan sejarah. Oleh karena itu, fenomena yang diungkap berkaitan dengan perkembangan transmigrasi mulai dari *kolonisasi* pada masa Kolonial Belanda sampai program transmigrasi pada masa Orde Baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang desa-desa transmigrasi di Pasaman.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, pertanyaan yang muncul di sekitar fokus penelitian tentang transmigrasi dan pengentasan kemiskinan ini mencakup :

1. Bagaimanakah program transmigrasi diselenggarakan sejak masa Hindia Belanda sampai Orde Baru di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan dari kebijaksanaan umum transmigrasi berjalan di lapangan ?.
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam program transmigrasi di Pasaman, sehingga pengentasan kemiskinan belum berhasil ?

Kebijaksanaan Transmigrasi Masa Hindia Belanda

Peralihan abad 19 ke abad 20 ditandai dengan adanya perubahan ide politik kolonial Belanda yakni meniadakan sistem eksploitasi dan menitik beratkan pada usaha kesejahteraan rakyat (Kartodirdjo, 1992). Oleh karena itu pemerintah Belanda menjadi lebih sadar akan pertanggung jawaban moral terhadap rakyat di tanah jajahan. Pemerintah Hindia Belanda pun mulai memikirkan kemakmuran dan pendidikan rakyatnya. Oleh karena itu pada akhir abad ke-19 dibentuk komisi negara yang ditugaskan untuk membuat penelitian mengenai kekurangan makmuran rakyat di daerah-daerah pedesaan Jawa. C. Th. van Deventer, seorang anggota Raad van Indie dalam majalah De Gids menguraikan tentang kemelaratan penduduk Jawa akibat Cultuur Stelsel (Tanam Paksa) dan ia menghimbau pemerintah untuk melakukan tindakan untuk memperbaiki nasib rakyat. Van Deventer membuat rumusan yang pokoknya adalah

edukasi, irigasi, dan emigrasi yang menjadi panduan kebijaksanaan politik Belanda yang dikenal dengan politik Etis (Kartodirdjo, 1978).

Dari hasil penelitian Komisi Penelitian Kemiskinan di Jawa, maka program emigrasi atau pemindahan penduduk dipandang perlu dilaksanakan. Oleh karena perlu adanya keseimbangan distribusi penduduk antara Jawa dan luar Jawa. Kepadatan penduduk akibat dari pertumbuhan penduduk yang pesat di Jawa telah menyebabkan banyak pengangguran dan petani banyak yang tidak punya tanah. Hal ini diperkirakan dapat menimbulkan keresahan sosial dan politik.

Program pemindahan penduduk ke Luar Jawa dikenal dengan nama kolonisasi dilaksanakan bukan saja atas pertimbangan demografi tetapi juga untuk memenuhi permintaan perusahaan besar akan tenaga kerja. Dengan adanya program kolonisasi ini akan memudahkan untuk mendapatkan tenaga kerja dan untuk penghematan biaya pengiriman tenaga kerja. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam pengiriman penduduk ke Luar Jawa dengan konsepsi politik enklave (Swasono, 1985), yaitu sedapat mungkin menyerupakan daerah-daerah transmigrasi dengan keadaan di Jawa.

Pada saat krisis ekonomi melanda Hindia Belanda mulai tahun 1930 pemerintah kembali melancarkan program kolonisasi. Kebijakan baru program ini, kolonisasi dikaitkan dengan pemerintahan marga. Artinya setelah 3 tahun kolonisasi dikelola menurut pola di Jawa, maka desa-desa itu diserahkan kepada pemerintahan marga dan selanjutnya para kolonis membayar pajak kepada marga.

Dalam penyelenggaraan kolonisasi, pemerintah memberikan kepada setiap kepala keluarga :

1. Persekot sebesar 15 gulden yang akan diperhitungkan dengan premi 20 gulden
2. Biaya pengangkutan ke daerah tujuan.
3. Bedeng-bedeng untuk tempat tinggal sementara.
4. Bantuan f 50 untuk pembuatan rumah.
5. Tanah sawah seluas $\frac{1}{4}$ bau, alat dapur, alat pertanian dan perkakas lain, bibit pertanian, hewan piaraan untuk bersama, obat-obatan.
6. Biaya kehidupan sebesar f 15 per kepala keluarga/bulan dan berlaku selama 2 tahun (Bulletin Kolonisasi, 1940).

Untuk melaksanakan pemindahan penduduk secara besar-besaran setelah tahun 1930, maka pemerintah mendirikan sebuah lembaga untuk melaksanakan pemindahan penduduk. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal No. 10 tanggal 23 April 1930 dibentuk Komite Sentral Kolonisasi (Centraal Koloniatie Committe) yang diketuai oleh

P.A.A. Kusumo Yudo, anggota Dewan Hindia Belanda (Raad van Indie), (Verslag van het Centraal Kolonisatie Comité, 1932). Tugas komisi ini adalah mempersiapkan tanah untuk penempatan para kolonis yang meliputi :

1. Meneliti mengenai tanah, keadaan air dalam tanah, pemerataan wilayah pada daerah yang terpilih.
2. Menyelesaikan pengurusan yang bersangkutan terutama hak-hak atas tanah, persoalan yang berkaitan dengan adat.
3. Pekerjaan persiapan ini untuk suatu daerah lamanya kurang lebih 2 tahun (Verslag van het Centraal Kolonisatie Comité, 1932).

Keberhasilan pemindahan penduduk ke Luar Jawa dari tahun 1935-1941 tidak terlepas dari gencarnya propaganda yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan oleh pegawai pemerintah maupun anggota Komite Sentral Kolonisasi. Propaganda dilakukan antara lain oleh penyuluh pertanian, guru-guru sekolah Bumiputra, pegawai Perkreditan Rakyat, pegawai Jawatan Kehutanan. Tujuan dari propaganda itu antara lain untuk menggerakkan beberapa orang, supaya mereka mengikuti program kolonisasi ; untuk menarik perhatian orang banyak supaya mereka tahu akan keuntungannya jika pindah ke tanah kolonisasi di seberang (Buletin Kolonisasi, 1938). Propaganda dilakukan melalui :

1. Pemutaran film, misalnya film suara kolonisasi “Tanah Seberang” yang menggambarkan kemakmuran desa kolonisasi di Tanah Seberang.
2. Kolonis yang dikirim ke Jawa untuk mempropagandakan tentang kemakmuran di desa kolonisasi.
3. Penerbitan buku yang mengisahkan kehidupan suatu keluarga tani Jawa yang sudah pindah ke tanah seberang. Salah satunya “Bojong menjang Tanah Sebrang” (pindah ke Tanah Sebrang). Buku ini dipakai untuk bahan ajar di sekolah-sekolah desa di Jawa (Buletin Kolonisasi, 1938).

Meskipun propaganda sudah dilaksanakan secara intensif di Jawa, tetapi orang yang mau dikirim dibatasi. Tiap tahun pemerintah harus bekerja keras supaya dapat memenuhi target pengiriman yaitu tiap tahun harus bertambah 2.000 kk dari jumlah pengiriman tahun sebelumnya (Buletin Kolonisasi, 1940). Walaupun demikian tidak semua peminat dapat dikirim karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikirim ke Tanah Seberang, yaitu :

1. Kolonis harus benar-benar orang tani.
2. Mereka harus berbadan kuat dan tidak punya penyakit kronis, tidak cacat

3. Hanya untuk warga yang sudah berumah tangga.
4. Keluarga kolonis tidak mempunyai anak kecil lebih dari 2 orang.
5. Bukan bekas kuli kontrak.
6. Bukan perempuan yang sedang hamil besar (Buletin Kolonisasi, 1940).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Jawa yang dipindahkan ke luar Jawa dalam Rangka Program Kolonisasi Tahun 1905-1941

Tahun	Jumlah (Jiwa)	Jumlah (KK)
1905-1911	7.000	-
1912-1922	17.494	-
1923-1931	4.000	-
1932	7.000	-
1933	750	-
1934	2.756	-
1935	14.710	-
1936	13.152	-
1938	32.259	-
1939	45.339	-
1940	52.853	-
1941	60.000	-
Jumlah	257.313	144.000

Sumber : Sri-Edi Swasono, 10 Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985, Jakarta : UI Press, 1985

Kebijakan Transmigrasi masa Orde Lama

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945 pemerintah Republik dihadapkan pada masalah apakah transmigrasi yang sudah dimulai sejak masa Hindia Belanda akan dilanjutkan atau tidak. Pemikiran tentang transmigrasi salah satunya dilontarkan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya pada tahun 1946 di Yogyakarta. Hatta menyebutkan tentang perlunya program pemindahan penduduk yang terencana (Ramadhan 1993 dan Soedigdo, 1965). Keputusan untuk melanjutkan transmigrasi diambil pada awal tahun 1950, saat itu kegiatan transmigrasi berada dalam Kementrian Pembangunan Masyarakat. Sejak itu dikenal dengan adanya Kantor Transmigrasi yang selanjutnya berubah menjadi Jawatan Transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi yang pertama terjadi di penghujung tahun 1950 dengan diberangkatkan 23 kk/77 jiwa ke Lampung.

Pemindahan penduduk masih mengutamakan pertanian sebagai sektor utama. Namun demikian terdapat beberapa perubahan kebijakan dari kebijaksanaan

kolonisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perubahan-perubahan itu antara lain :

1. Golongan penduduk yang ditransmigrasikan diperbanyak, bukan hanya petani kecil, tetapi juga petani yang terkena bencana alam atau proyek pembangunan, bahkan juga golongan eks Angkatan Bersenjata.
2. Memperluas jatah tanah garapan menjadi 2 ha tanah dan menambah bekal transmigrasi untuk mengatasi kesulitan dalam masa setelah penempatan di daerah baru tersebut.
3. Penghapusan politik enklave dan diharapkan orang Jawa dan Sumatera bersatu dalam kesatuan yang baru yang lebih besar (Transkopemada, 1960).

Dengan adanya perluasan golongan penduduk yang boleh ikut program transmigrasi, maka pada pengiriman transmigrasi tahun 1950-1955 disamping transmigrasi umum juga ada transmigrasi khusus. Transmigrasi khusus yang dikirim antara lain :

1. Bekas tahanan SOB
2. Penempatan Repatrian Suriname
3. Bekas anggota pejuang
4. Bekas anggota tentara (Ramadhan 1993)

Rumusan tentang tujuan program Transmigrasi nasional ini tertuang dalam PP pengganti UU No. 29/1960 tanggal 17 Agustus 1962 mengenai Pokok-Pokok Usaha Transmigrasi yaitu: mempertinggi taraf keamanan, kemakmuran, dan kesatuan bangsa dengan jalan :

1. Membuka sumber alam baru.
2. Mengurangi tekanan penduduk daerah padat dan mengisi daerah yang kosong/ tipis penduduknya.
3. Mengisi pembangunan daerah yang mempunyai arti vital.

Pada program transmigrasi periode 1950-1965, rata-rata 5.872 kepala keluarga pertahun yang ditransmigrasikan. Jumlah pengiriman transmigran menurun pada periode 1966-1968, yaitu rata-rata 1.483 kepala keluarga pertahun. Hal ini disebabkan adanya peristiwa Gerakan 30 September, pada periode ini terjadi pergantian-pergantian petugas dan terjadi ketidakefektifan pemerintahan.

Selama pelaksanaan program transmigrasi dari tahun 1960an dan awal dasa warsa 1970an penentuan daerah asal para transmigran tidak mengalami perubahan

dibandingkan dari masa kolonisasi. Jawa Tengah dan Yogyakarta menyumbangkan hampir separuh jumlah transmigrasi dan Jawa Timur seperempatnya lagi.

Untuk penanganan selanjutnya pada desa-desa transmigrasi pemerintah menetapkan pada pasal 15 PP No. 56/1958 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setelah sesuatu daerah transmigrasi dalam pertumbuhan dan perkembangannya mencapai suatu taraf yang layak yang memungkinkan berdiri dan berjalan sendiri. Maka pemerintah atas usul Dewan Pertimbangan Transmigrasi dan menyerahkan segala urusan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Tingkat I yang bersangkutan (Franskopemada, 1960)’

Periode 1945-1965 Indonesia mengalami banyak masalah dalam bidang ekonomi dan politik, berpengaruh pada berjalannya program transmigrasi. Dalam masalah transmigrasi pada masa Orde Lama berpindah-pindah penanganannya dari kementerian satu dengan yang lain dengan berbagai pergantian rencana.

Kebijakan Transmigrasi Masa Orde Baru

Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama dimulai pada bulan April 1969, dan program utamanya adalah menstabilkan perekonomian Indonesia setelah terjadinya kekacauan politik dan ekonomi di tahun 1960an. Oleh karena itu tujuan umum dari program transmigrasi berorientasi untuk membantu Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1974 (Fasbender, 1990).

Penyelenggaraan transmigrasi masih menggunakan referensi pengalaman pada masa pra-Pelita. Orientasinya masih mengacu pada penyebaran penduduk dari Jawa ke pulau lain yang sebesar-besarnya. Program transmigrasi ini diselenggarakan oleh Departemen Transmigrasi dan Koperasi. Terdapat 3 hal yang dihasilkan pada masa Pelita I ini yang berkaitan dengan program transmigrasi, yaitu : (Ramadhan, 1993)

1. Undang-undang No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.
2. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi.
3. Keputusan Pemerintah tentang Ketetapan Daerah Penempatan No.2 tahun 1973

Undang-undang No. 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi ini menggantikan sejumlah undang-undang lama, dan meletakkan dasar untuk pendekatan yang lebih baik dan lebih sistematis bagi pelaksanaan program transmigrasi. Pada undang-undang ini dijelaskan mengenai tujuan penyelenggaraan perpindahan penduduk, yaitu :

- a. Peningkatan taraf hidup
- b. Pembangunan daerah
- c. Keseimbangan penyebaran penduduk
- d. Pembangunan yang merata diseluruh Indonesia
- e. Pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia
- f. Kesatuan dan persatuan bangsa
- g. Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional

Mengenai perolehan tanah bagi transmigran ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No. 3 tahun 1972 bahwa para transmigran berhak mendapatkan tanah dengan hak atas tanah menurut ketentuan. Dan lebih lanjut pelaksanaannya tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1973 sebagai berikut:

1. Transmigran petani berhak memperoleh tanah sedikit-dikitnya 2 hektar yang penggunaannya dibagi sebagai berikut :
 - a. Seperempat hektar dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.
 - b. 1 3/4 hektar dipergunakan untuk peladangan dan/atau persawahan.
2. Transmigran bukan petani berhak memperoleh tanah sedikitnya-dikitnya seluas seperempat hektar yang dipergunakan untuk rumah dan pekarangan.

Kebijaksanaan transmigrasi pada Pelita I dan kemudian dilanjutkan pada Pelita II adalah menekankan lebih besar pada masalah perluasan pertanian dan pembangunan regional. Bila di Jawa pembangunan pertanian dititikberatkan pada cara-cara bercocok tanam yang intensif, sedangkan di luar Jawa tekanan ditaruh pada usaha perluasan tanah pertanian. Berkaitan dengan ini maka calon transmigran harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Mereka yang potensial umur tidak lebih dari 40 tahun
- b. Mereka yang bermotivasi tinggi
- c. Mereka yang relatif paling memerlukan, seperti petani yang tidak memiliki tanah, buruh tani, petani kecil, dan sejenisnya (Warsito , 1984).

Tetapi pada prakteknya kriteria seleksi yang ditetapkan ini tidak diikuti secara konsisten, terutama yang berkaitan dengan umur. Hal ini disebabkan karena mereka yang menjalankan kebijaksanaan dikejar target dalam rangka meningkatkan jumlah transmigran. (Ramadhan, 1993)

Pada Pelita I telah ditransmigrasikan sebanyak 39.436 kk/180.641 jiwa (tabel 5) yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Lombok.

Tabel 2 Jumlah Transmigrasi Umum Pelita I
(1969/1970 – 1973/1974)

Tahun	Kepala Keluarga	Jumlah Jiwa
1969-1970	3.933	17.848
1970-1971	4.438	19.985
1971-1972	4.171	18.870
1972-1973	11.314	51.920
1973-1974	15.580	72.018
Jumlah	39.436	180.641

Sumber : Karl Fasbender, Susanne Erbe, *Towards a New Home: Indonesia's Managed Mass Migration*, Hamburg: Verlag eltarohiv GMBH, 1990 hal 70

Desa-Desa Transmigran

1. Desa Tongar

Unit Pemukiman Transmigrasi Tongar yang dihuni oleh Repatrian Suriname yang datang pertama pada tanggal 12 Februari 1954 mempunyai cerita dan perkembangan tersendiri. Dimulai dari Yayasan Tanah Air ini yang mengadakan hubungan dengan pemerintah Indonesia tentang rencana kepulangan mereka dan mengusahakan untuk mendapatkan tanah sebagai tempat tinggal mereka di Indonesia. Oleh karena di Jawa sudah tidak ada lahan kosong dan di Lampung telah dicadangkan sebagai daerah Transmigrasi dari Jawa, maka Jawatan Transmigrasi mengusulkan sebidang tanah di Sumatera Tengah. Mereka mengadakan peninjauan ke Pasaman, yaitu tanah di Kenagarian Air Gadang seluas 5200 ha. Pada survey pertama, tanah yang disediakan ini sebagian besar masih tertutup oleh hutan, tetapi ada tanah seluas 300 ha ditumbuhi alang-alang, tanah ini membentang sepanjang jalan kelas II (Heeren, 1979) seluas 400m. Kemudian pemerintah mengadakan kerjasama dengan kepala adat agar bersedia menyerahkan sebagian tanahnya. Kepala-kepala adat setempat bersedia menyerahkan tanahnya sebagian dengan persyaratan khusus yang tercantum dalam Akte Penyerahan yang ditandatangani tanggal 8 Mei 1953, pasal-pasal terpenting berbunyi sebagai berikut (Heeren, 1979):

“Kami menyerahkan tanah ini kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman supaya pemerintah selanjutnya dapat menyerahkannya lagi kepada saudara-saudara kami dari Suriname dan keturunannya menjadi hak milik mereka dengan syarat-syarat berikut”. Pendatang baru akan menjadi anggota masyarakat adat dan berada di bawah Pemerintahan Nagari Air Gadang sehingga mereka mengambil bagian pada suka duka penduduk asli Air Gadang. Ganti rugi untuk hasil tanaman-tanaman yang sudah diusahakan oleh penduduk asli disana akan diatur

oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman bersama-sama dengan ninik mamak daerah yang bersangkutan sesuai dengan adat dan dalam jumlah yang layak. Tidak termasuk dalam penyerahan ini adalah rumah dan halaman yang pada waktu penyerahan dilaksanakan, mungkin masih terdapat di tanah ini.

Akan tetapi beberapa bulan sebelum Repatrian Suriname datang kepala-kepala adat meminta kembali sebidang tanahnya yang seluas 400 m dan terletak di sepanjang jalan kelas II itu. Oleh karena itu setelah Repatrian Suriname itu datang timbul permasalahan :

- a. Letak tanah yang diberikan tidak lagi di pinggir jalan sehingga sulit ditempuh oleh traktor
- b. Ternyata daerah itu tidak datar melainkan banyak anak sungai yang kecil.
- c. Dan dari hasil penelitian tanah yang dilakukan pada akhir tahun 1955 menunjukkan bahwa tanah itu tidak begitu cocok untuk penanaman padi.

Tanah itu oleh Yayasan Tanah Air dibagikan kepada anggota berdasarkan aturan. Aturan dalam pembagian tanah lebih ditentukan pada pengerjaannya saja seperti antara pemukiman, persawahan dan ladang. (Dokumentasi YTA, 1983):

Tiap keluarga hanya diberi 1 ha untuk rumah dan pekarangan. Kemudian, untuk sawah dan ladang sebanyak 4 ha/kk diolah secara berkelompok. Satu kelompok biasanya terdiri dari 4 kk. Akan tetapi, mereka juga dapat mengerjakan tanah sawah dan ladang itu dengan sistem upah perjam (Wawancara Soerip, 1999). Menurut rencana pada tanah milik bersama akan ditanami coklat, kopi dan tanaman tahunan yang lain. Hasil panen nanti akan disimpan oleh Yayasan dan dijual secara bersamaan, kemudian pada setiap akhir tahun yayasan akan membagi keuntungan berdasarkan saham serta sesuai dengan jumlah jam kerja tiap anggota tiap tahun.

Pembukaan perkampungan Repatrian Suriname ditangani langsung oleh Yayasan Tanah Air (YTA). Yayasan ini membentuk divisi-divisi kerja. Divisi-divisi itu ialah :

1. Proyek pembukaan kampung di bawah pimpinan Ketua Yayasan Tanah Air, SM Harjo.
2. Tata Usaha serta urusan pendidikan dan pengajaran dibawah pimpinan : FN Soemopawiro.
3. Penyelenggaraan pekerjaan bidang pertanian, perikanan dan pembibitan, pimpinan Doerat.
4. Perdagangan, toko, gudang, dan krani dipimpin oleh L. Sirtja.
5. Koesman sebagai kepala urusan pusat penggajian kayu.

6. M. Bledoeg, sebagai kepala urusan bidang bengkel, kendaraan dan listrik.
7. Parmin, sebagai kepala pembangunan rumah dan bangunan.
8. A.J. Senawi sebagai kepala urusan kesehatan.
9. J. Poentjopawiro sebagai kepala urusan keamanan kampung yang membawahi bidang pendataan rumah dan urusan antar warga.
10. Soeratman sebagai kepala administrasi yang membawahi bidang pembukuan umum, keuangan, honor pengurus, krani, ekspedisi, pos dan juru ketik.
11. S.A. Taguan Hardjo sebagai kepala urusan penentuan dan pengukuran serta gambar. (Laporan Umum Yayasan Tanah Air, 1995)

Kelompok Repatrian Suriname yang datang ke Tongar ini kebanyakan waktu di Suriname mereka tinggal di daerah pedesaan dan sebagian kecil mereka tinggal di kota. Meskipun demikian saat mereka sampai di Tongar berhadapan dengan hutan belantara dan tinggal di rumah bambu dengan atapnya alang. Mereka tidak siap karena sebagian besar mereka adalah petani (52 %) dan selebihnya adalah teknisi dan tukang batu.

Permasalahan yang ditemui adalah terdapatnya ketidakcocokan letak tempat dengan perjanjian semula. Letak tanah yang akan digarap tidak berada ditepi jalan, tetapi agak masuk ke dalam. Hal ini disebabkan karena tanah selebar 400 m yang direncanakan, kemudian diminta kembali oleh penduduk asli. Daerah pemukiman yang tersedia sulit ditempuh oleh traktor karena tidak datar dan banyak melalui anak sungai yang kecil. Kemudian dari hasil penelitian tanah yang dilakukan pada akhir tahun 1955 menunjukkan bahwa tanah itu tidak begitu cocok untuk penanaman padi. Oleh karena itu, tanah yang telah dibuka seluas 110 ha hanya dapat ditanami dengan kacang, ubi kayu, dan kedelai. Akan tetapi hasil tanaman hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, tanah yang telah dibuka diantaranya ditanami padi gogo, kacang-kacangan dan ubi kayu. Akibat teknisi jumlahnya terlalu banyak dibanding dengan pekerjaan yang ada, dan mereka tidak terbiasa dengan pekerjaan tani, tinggal di hutan, maka mulai Oktober 1954 telah ada repatrian yang meninggalkan pemukiman. (Dokumen YTA, 1983). Mereka bekerja di perminyakan Pekanbaru, Medan, dan Palembang. Permasalahan lain yang muncul dalam interaksi dengan penduduk asli dan masalah bahasa. Kebanyakan Repatrian Suriname tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, sehingga sulit berkomunikasi dengan penduduk asli. Penyelesaiannya adalah memberikan pelajaran bahasa Indonesia di sekolah rakyat yang didirikan di Tongar. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar, sedangkan untuk kalangan orang dewasa diajarkan bahasa Indonesia dalam kesempatan pertemuan-pertemuan.

Persoalan ini masih ditambah dengan adanya kesenjangan tingkat kehidupan antara penduduk asli dan pendatang, sehingga menimbulkan perasaan iri hati di kalangan penduduk asli. Keadaan Desa Tongar yang ramai dihuni Repatrian Suriname, kurang lebih ada 1000 orang. Mereka mengadakan pembangunan baru : mendirikan rumah, gedung sekolah, dan lain-lain. Mereka mengusahakan tanah yang dilakukan dengan memakai perkakas serba modern, di malam hari desa transmigrasi itu diterangi oleh listrik kepunyaan mereka sendiri (Wawancara, Legiman, 1999), sedangkan di kampung penduduk asli mereka masih menggunakan lampu minyak.

Permasalahan Tongar berlainan dengan desa transmigrasi Jawa lainnya yang ada di Pasaman. Mereka yang datang ke Tongar memiliki modal sendiri untuk membangun daerah baru. Divisi kerja difungsikan, pembangunan perumahan dimulai dan juga pendirian pabrik-pabrik, seperti pabrik tapioka, pabrik es lilin dan perusahaan penggergajian kayu. Penggergajian kayu ini menghasilkan kayu olahan yang selain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan perumahan di Tongar, juga untuk dijual ke desa-desa lain (Hardjo, 1989). Dalam bidang pertanian diusahakan ke penanaman tanaman tahunan, seperti karet, kopi, kelapa. (Tabel. 15)

Tabel 3 Jumlah tanaman di Tongar tahun 1954-1957

Tanaman	Jumlah (batang)
Kelapa	4.760
Cengkeh	21.000
Karet	33.000
Kopi	21.000
Buah-buahan	715
Coklat	200

Sumber : Yayasan Tanah Air, 1957.

Namun tanaman ini baru akan memberikan hasil setelah beberapa tahun kemudian. Pada periode awal kedatangan mereka berharap dari tanaman kacang-kacangan dan ubi kayu. Selain dari saham repatrian yang ditanam pada Yayasan Tanah Air, modal pembangunan desa juga didapat dari pinjaman uang pada pemerintah Republik Indonesia. Dana diperoleh dari pinjaman pertama sebesar 1,5 juta rupiah yang sudah harus mulai diangsur tahun 1957, dengan tenggang waktu yang diberikan selama 10 tahun. (Koriun, 1998)

Kemudian untuk tetap menyatukan kehidupan bersama antar repatrian, Yayasan Tanah Air mendirikan koperasi bersama. Pada tahun 1954 dimulai dengan diadakannya pelatihan-pelatihan dan dalam rencana Yayasan nantinya semua perusahaan akan dijadikan koperasi, sehingga ada koperasi produksi, koperasi dagang, koperasi perikanan dan lain-lain dan keseluruhan koperasi itu diawasi oleh salah satu badan pusat. (Laporan YTA, 1954) Berdasarkan inisiatif Yayasan dibentuk juga Lembaga Sosial Desa pada tahun 1955. Lembaga ini bertujuan untuk membantu penduduk yang mengalami kecelakaan, kematian maupun yang kekurangan secara ekonomi. (Wawancara, Kasan Mustar, 1996 dalam Koriun, 1998) Sarana pendidikan juga menjadi prioritas perhatian Yayasan. Oleh karena itu pada tahun 1955 telah dibangun Sekolah Rakyat (SR). Hal ini dimaksudkan agar anak-anak usia sekolah di Tongar bisa mengecap pendidikan dan juga bagi pendidikan anak-anak dari kampung di sekitar Tongar. (Hardjo, 1989)

Mulai dari saat kedatangan tahun 1954 sampai dengan tahun 1957 berbagai pembangunan telah terlaksana, seperti Sekolah Rakyat, pabrik dan berbagai pembelian barang, seperti traktor, kendaraan roda empat. (Tabel. 16)

Tabel 4 : Jumlah Bangunan di Tongar tahun 1983

No	Keterangan	Jumlah
	Gedung SR	1
	Kantor	1
	Balai Pengobatan	1
	Balai Pertemuan	1
	Gudang	6
	Somel	1
	Helir (Penggilingan Padi)	1
	Kilang Tapioka	1
	Kilang Es Lilin	1
	Usaha batu bata	1
	Bengkel	1
	Listrik	1
	Kendaraan bermotor roda 4	5
	Traktor pertanian	3

Sumber : Dokumentasi yayasaan Tanah air, 1983

Permasalahan intern yang muncul di Tongar terutama masalah kesenjangan sosial antara pekerja kasar (buruh pabrik) dengan tenaga administrasi pabrik yang berpendidikan. Gaji yang diterima tenaga berpendidikan lebih tinggi dari buruh kasar.

Padahal pembagian kerja yang ditetapkan Yayasan sudah berdasarkan keahlian mereka. (Hardjo, 1989)

Permasalahan lain adalah rasa tidak puas warga terhadap Yayasan dalam pembagian tanah dan perumahan. Misalnya, jarak antara lahan perumahan dan lahan pertanian yang berjauhan. Dalam menentukan lahan pertanian dan perumahan warga Yayasan melakukannya dengan cara lotere dan masing-masing kepala keluarga yang mengambil lotere penentuan letak tanah mereka. (Hardjo, 1989)

Sampai dengan tahun 1960-an Tongar merupakan desa transmigran yang berhasil. Tanaman padi ladang rata-rata mencapai 3-4 ton padi/hektar. (Wawancara, Sapar, 1999). Tanaman keras yang berhasil ditanam, antara lain cengkeh, karet dan kopi. Walaupun demikian mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan produk pertaniannya, terhambat oleh buruknya sarana jalan. Tongar terletak di kenagarian Air Gadang, sedangkan pasar yang terdekat berada di Simpang Empat. Jalan antara Air Gadang dan Simpang Empat dibelah oleh Batang Pasaman dan di sana belum ada jembatan yang menghubungkannya. Di sini tersedia rakit pelayangan untuk menyeberangkan mobil, orang, dan barang-barang menuju Simpang Empat. (Sumatera Tengah Membangun, 1955)

Sejak tahun 1960 Tongar telah menjadi bagian dari kenagarian Air Gadang, yaitu menjadi jorong Tongar. Ketua Yayasan Tanah Air SM Hardjo diangkat menjadi wali jorong (1960-1974) (Korun, 1998). Akan tetapi di bawah struktur itu masyarakat Jawa di Tongar masih tetap menggunakan pola pemerintahan desa, seperti di Jawa. (Wawancara, Kasan Mustar, 1999)

Dalam pertumbuhannya Tongar mengalami kemunduran setelah terjadinya pergolakan sosial PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) pada tahun 1958-1963 di Sumatera Barat. Pada saat terjadi pergolakan daerah itu banyak sarana bangunan usaha dirusak, jaringan listrik diputuskan, dan 5 buah mobil yang dimiliki Yayasan diambil. (Wawancara, Kasan Mustar, 1999). Akibat terjadinya PRRI penduduk Tongar tidak berani pergi ke ladang, maka setelah tahun 1963, banyak ladang penduduk yang terbengkalai.

Situasi Tongar setelah pergolakan daerah tahun 1963 mengalami berbagai kerusakan dan banyak yang tidak berfungsi. Sebagai contoh dapat digambarkan sebagai berikut: pabrik dan kilang pengolahan tidak dapat berfungsi karena tidak ada jaringan listrik, ladang-ladang terbengkalai dan ditumbuhi semak belukar, sehingga manakala

musim kering berlangsung, maka banyak kebun-kebun milik penduduk terbakar. (Koriun, 1998 dan dikonfirmasi kembali dengan Wawancara di Tongar, 1999).

Sarana usaha Yayasan banyak mengalami kerusakan, pabrik tidak dapat berjalan. Untuk mempertahankan hidup penduduk Tongar banyak yang menjual perhiasan, pakaian untuk ditukar dengan bahan pangan. (Wawancara, Legiman, 1999). Setelah peristiwa PRRI ini bantuan pinjaman uang dari pemerintah pusat pada Yayasanpun terhenti, sehingga Yayasan tidak bisa merenovasi pabrik-pabrik yang rusak (Wawancara, Kamsoeni, 1999) Kehidupan yang sulit ini menyebabkan banyaknya repatrian Suriname meninggalkan Tongar. (Dokumentasi YTA, 1983) Bila pada tahun 1957-1958 repatrian Suriname masih berjumlah 900-an orang, maka pada tahun 1962-1963 hanya berkisar 600-an orang. (Tabel. 17)

Tabel 5 : Jumlah Repatrian Suriname di Tongar tahun 1954-1983

Tahun	Jumlah
1954	999
1957	924
1962	685
1967	443
1972	262
1977	133
1982	92
1983	91

Sumber : Diambil dari dokumentasi Yayasan Tanah Air 1983

Oleh karena makin berkurangnya penduduk Tongar, maka dari hasil permusyawaratan antara repatrian Suriname yang masih tinggal di Tongar, mereka meminta pada Jawatan Transmigrasi agar didatangkan lagi transmigran dari Jawa ke Tongar. (Wawancara, Gimán, 1999) Jadi pada tahun 1968 didatangkan transmigran dari Jawa Timur sebanyak 101kk/343 jiwa dan ditempatkan di Jurang yang letaknya 600 meter dari Tongar. (Wawancara, Sahilat, 1999 dan Data UPT Serah Pra Pelita s/d Tahun III Pelita VI) Mereka ditempatkan di tanah milik Yayasan yang telah ditinggalkan penghuninya. (Wawancara, Gimán, 1999), dan masing-masingnya mendapat tanah seluas 2 ha.

Dari hasil wawancara disebutkan bahwa keadaan Tongar kembali hidup setelah didatangkan lagi transmigran dari Jawa. Bila pada tahun 1967 penduduk Tongar hanya berjumlah 622 orang, kemudian pada tahun 1968 bertambah menjadi 965 orang (Dokumen YTA, 1983)

Tongar yang terletak di dataran rendah dan mempunyai luas desa 22,19km² pada tahun 1980 hanya berpenduduk 142kk/583 jiwa. Hal ini disebabkan karena berkurangnya jumlah repatrian Suriname karena kematian generasi pertama dan banyaknya generasi muda yang meninggalkan Tongar, sehingga tahun 1980 hanya tinggal 94 orang (Dokumentasi YTA, 1983).

Di Tongar terdapat 1 SD Negeri dengan ruang kelas berjumlah 6 ruang, kesemuanya dalam keadaan baik. Dari jumlah 583 jiwa, terdapat 163 anak dalam \usia sekolah (tabel 18)

Tabel 6 : Data Penduduk Menurut umur di Tongar tahun 1980 (jiwa)

No	Umur	Jumlah
1	0-4	78
2	5-9	85
3	10-14	78
4	15-24	96
5	25-49	140
6	50-	106

Sumber : Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman, 1980

Menurut hasil wawancara, oleh karena terbatasnya potensi sekolah dasar di Tongar, banyak diantara anak-anak transmigran yang bersekolah ke desa sekitarnya seperti Air Gadang. Untuk melanjutkan ke sekolah tingkat SLTP maupun SLTA, mereka banyak sekolah ke Simpang Empat.

Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani sawah. Mereka memakai model pertanian non irigasi. Tanah sawah non irigasi di Tongar luasnya mencapai 107 ha, sedangkan tanah tegalan mencapai 175 ha, dengan sarana pertanian yang telah ada sebagai pemberantas hama dan penggilingan padi sebanyak 3 buah. (Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman, 1980). Selain bertani, masyarakat ada juga bekerja sebagai

pedagang dan industri rumah tangga, usaha ternak sapi. Jumlah usaha ternak sapi sebanyak 106 ekor.

Tabel 7: Data Penduduk Menurut Pekerjaan di Tongar 1980 (Jiwa)

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	115
2	Peternakan	42
3	Industri Rumah Tangga	17
4	Perdagangan	5

Sumber : Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman, 1980

Sarana jalan yang ada berupa jalan tanah yang belum diperkeras dan sudah terdapat jembatan dari kayu. Walaupun jalan ini tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat, tetapi penduduk tidak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil ternak dan pertanian, karena letak Tongar yang berdekatan dengan jalan propinsi.

Sampai tahun 1980, Tongar belum memiliki Puskesmas. Akan tetapi sudah ada pos keluarga berencana. Setelah PRRI tahun 1963, di Tongar tidak ada lagi penerangan listrik. Keadaan ini tidak menghalangi penduduk untuk dapat memiliki radio dan tv. Dibandingkan dengan desa transmigrasi di Desa Baru maupun di Kinali, pada tahun 1980, di Tongar telah ada 5 TV dan 50 buah radio (Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman, 1980) Sarana peribadatan yang ada di Tongar antara lain 1 masjid, 1 langgar, dan 1 rumah yang digunakan untuk gereja.

Tahun 1974-1988 Tongar masih merupakan desa yang berkembang. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemekaran Tongar menjadi 3 dusun, yaitu Dusun Tongar I, Tongar II, dan Sidodadi. (Wawancara, Kamsoeni, 1999) Oleh karena keberhasilan dalam pembangunan, pada tahun 1987 Tongar mendapatkan penghargaan sebagai juara pertama Perlombaan Desa Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Pada tahun 1987, perusahaan perkebunan swasta PT Tunas Rimba Raya menyewa Tanah Tongar melalui ketua yayasan Tanah Air. Dari hasil sewa tanah itu, dijanjikan akan dibangun mesjid dan lapangan bola oleh pemilik modal PT itu. Akan tetapi, pada tahun 1989 PT Tunas Rimba Raya mendapatkan tanah seluas 270 ha untuk perkebunan coklat. Kemudian pada tahun 1991, terjadi perluasan tanah mencapai 1000 ha yang digarap oleh perkebunan. Perluasan yang melibatkan BPD, Bupati, dan juga penghulu mengakibatkan tanah yang dimiliki oleh warga Tongar, juga diambil alih oleh pihak perkebunan. Pada akhirnya, tanah yang terdapat di Tongar tidak hanya dijadikan

untuk menanam coklat, tetapi juga dijadikan sebagai pohon sawit. Oleh karena itu, tanah yang dimiliki warga Tongar menjadi berkurang. Pada tahun 1992 misalnya, tanah yang dimiliki warga Tongar tinggal 400 ha, yang perinciannya sebagai berikut ;

- a. lahan pekarangan 51 ha
- b. Lahan persawahan/tegalan 135 ha
- c. Diberikan pada transmigrasi asal Jawa Timur tahun 1968 220 ha
- d. Tanah yang dijual pemiliknya 51 ha (wawancara Suryadi, 1999).

Akibat dari pengembangan perkebunan di Tongar, terjadi konflik antara penduduk Tongar dengan PT Tunas Rimba Raya. Konflik mencapai puncaknya, ketika penduduk menutupi jalan menuju areal perkebunan. Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, PT Tunas Rimba Raya terpaksa membekukan operasinya, karena tuntutan yang terus menerus dari penduduk Tongar, terutama pemakaian tanah yang tidak sesuai dengan perjanjian semula.

2. Kinali desa Bangunrejo

Kabupaten Pasaman telah menerima transmigran sejak tahun 1953, Kecamatan Sungai Beremas dan Kecamatan Pasaman menjadi daerah paling banyak menerima transmigran di wilayah Pasaman Barat. Kenagarian Kinali yang berada di Kecamatan Pasaman telah menerima transmigran sejak tahun 1962. Sejak tahun 1962 sampai 1964 secara berturut-turut ditempatkan transmigrasi umum yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur di kenagarian Kinali sebanyak 607 Kk/2620 jiwa (Data UPT Serah Pra Pelita s/d Pelita VII). Transmigran ditempatkan di unit pemukiman transmigrasi Kinali dan membentuk desa-desa seperti Sumber Agung, Wonosari, Sidodadi Alamanda, dan Bangunrejo.

Penempatan lokasi bagi transmigran ditentukan oleh pemerintah dan sebelum transmigran datang, pemerintah telah menyiapkan tanah pemukiman sejak tahun 1961. Ninik mamak dari 27 kaum di kenagarian Kinali yang meminta kepada pemerintah untuk kedatangan transmigran dari Jawa. Mereka menyerahkan tanah seluas lebih kurang 16.500 ha untuk areal transmigrasi, dengan surat penyerahan tanah nomor 01/KAKN/1961 tanggal 26 September 1961 (Proyek Transmigrasi Kinali, 1976). Pada awalnya, kenagarian Kinali hanya terdiri dari 5 desa yaitu Enam Koto, Enam Koto Utara, Langgam, Empat Koto, dan Limau Purut (Monografi Kenagarian Kinali, 1977).

Menurut perjanjian, transmigran akan menerima sekitar $\frac{1}{4}$ hektar tanah untuk pekarangan dan tanah untuk perumahan, sedangkan $1\frac{3}{4}$ hektar tanah untuk sawah. Mereka juga mendapat bantuan berupa alat-alat pertanian, bibit

tanaman, alat dapur, bahan pakaian, rumah, dan bahan makanan selama 6 – 10 bulan (Transkopemada, 1960). Dalam kenyataannya terbukti lain. Hal ini terutama dalam pemberian alat pertanian karena tidak semua kepala keluarga mendapatkannya. Untuk membeli, mereka tidak ada. Pemberian bantuan makanan (beras dan lauk pauk) hanya 6 bulan. Pada hal saat itu, lahan persawahan belum menghasilkan.

Pada saat mereka masih mendapatkan bantuan beras dan lauk-pauk, kehidupan masih dikatakan sulit karena untuk memenuhi keperluan sehari-hari lainnya. mereka harus mencari sendiri. Mereka bekerja sebagai buruh tani di desa-desa penduduk asli ataupun mengumpulkan kayu di hutan dan kemudian mereka. Hasil penjualan kayu itu ditukarkan dengan bibit kelapa. Warga transmigrasi yang bekerja pada penduduk asli sering mendapatkan upah yang tidak sesuai.

Keadaan ekonomi yang sulit di desa-desa transmigrasi dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menarik massa. Sebenarnya di wilayah pemukiman transmigrasi Kinali tidak ada tokoh PKI. PKI bekerja menarik massa hanya melalui seorang petugas kesehatan yang bernama Sutrisno. Ia tinggal di desa Alamanda. Melalui Sutrisno, warga pemukiman transmigrasi didaftar untuk menjadi anggota PKI. Setelah itu mereka diberi bantuan peralatan pertanian, dan bibit tanaman. Oleh karena itu, pasca G 30 S PKI, banyak transmigran yang terkena wajib lapor.

Kesulitan hidup yang terjadi pada tahun pertama kedatangan sampai 1965-an digambarkan banyak warga transmigran yang makan nasi gaplek atau tiwul (ubi kayu yang telah dikeringkan dan kemudian ditumbuk halus).

Untuk melihat perkembangan kehidupan di Bangunrejo, dapat dilihat dari keadaan umum di kenagarian Kinali. Sampai tahun 1975, permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya angka pengangguran diperkirakan 600 orang tidak mempunyai mata pencaharian sama sekali (Monografi Kenagarian Kinali, 1977). Dilihat dari tingkat pendidikan warga, sampai tahun 1970-an masih ada 300 orang penduduk yang buta huruf dan anak putus sekolah mencapai 150 orang. Kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak disebabkan rendahnya pendapatan. Dari sekitar 6000-an orang anak usia sekolah, anak yang masih sekolah hanya 1351 orang (Tabel 20). Untuk sekitar 6000-an anak di Kinali hanya tersedia 20 buah SD (Tabel 21).

Tabel 8 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkatan Umur Tahun 1975

	Umur	Jumlah
	0 – 4	2500

	0 – 14	6150
	15 – 24	4500
	24 - keatas	5526

Sumber : Monografi Kenagarian Kinali (1977).

Tabel 8 : Jumlah Sekolah dan Murid di Kinali Tahun 1997

	Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid
	SD	20	1026
	SLTP (swasta)	1	45
	PGA 4 tahun	1	70
	PGA 6 tahun	1	110
	Ibtidaiyah	1	110

Sumber : Monografi kenagarian kinali (1997)

Sampai pada tahun 1977, dari 160 ribu ha lahan untuk pemukiman transmigran, baru sekitar 53 ribu ha tanah yang berhasil digarap oleh transmigran. Ketidakmampuan mereka untuk menggarap lahan yang luas itu disebabkan faktor alam seperti kayunya yang besar-besar dan daerah yang sulit untuk dilalui. (Tabel 22). Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian. Disamping itu, mereka juga menanam kebun dengan tanaman tahunan seperti karet, cengkeh, dan kopi (T

Tabel 9 : Daftar Penggunaan Tanah di Kanagarian Kinali tahun 1971.

	Status tanah	Luas
	Hutan belantara	88.000
	Tegalan/ ladang	6.000
	Sawah	25.000
	Pekarangan	20.000
	Perkebunan	2.000
	Tanah gundul	8.000
	Tanah rawa	11.000
	JUMLAH	160.000

Sumber : Monografi kanagarian kinali(1977).

Tabel 10 : Luas Perkebunan dan Hasil Produksinya di Kinali Tahun 1975

Tanaman	Luas/Ha	Hasil produksi Ton/tahun
---------	---------	--------------------------

Karet	400	150
Cengkeh	800	50
Kopi	200	10

Sumber : Monografi kenagarian Kinali , 1977

Dari tanah seluas 160 ribu ha di Kenagarian Kinali, hanya sekitar 400 ha luas desa Bangunrejo, dan 80 ha diantaranya masih berupa hutan (Tabel 24). Penduduknya lebih banyak menggarap lahan kering dan mereka menanam padi ladang, kacang tanah, kacang ijo, cabe, dan untuk tanaman seperti kelapa, jengkol dan kopi.

Tabel 11 : Luas dan Penggunaan Tanah di desa Bangunrejo tahun 1975

No	Status Tanah	Luas (ha)
	Lahan Pekarangan	33
	Lahan Basah	90
	Lahan Kering	197
	Hutan	80
	Luas total	400

Sumber : Monografi desa Bangunrejo (1977).

Desa Bangunrejo berdiri pada tahun 1964. Desa ini dihuni pertamakali sebanyak 125 kk, yang berasal dari : 25kk/Jateng, 40kk/Jatim dan 60kk/Jabar. Soal penamaan desa berdasarkan musyawarah antar warga dan bukan merupakan nama desa asal mereka di Jawa. Bangunrejo berasal dari dua kata: bangun yang artinya pembangunan dan rejo artinya ramai. Jadi Bangunrejo berarti daerah yang ramai dengan pembangunan perumahan.

Sebelum lahirnya UU No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, Bangunrejo merupakan jorong dari Kenagarian Kinali dan Kepala Jorongnya dari tahun 1973-1979 bernama Sukasto (Monografi Kenagarian Kinali, 1977), walaupun pada pemerintahan di bawahnya masih tetap menggunakan sistem pemerintahan desa di Jawa.

Sistem sabbat-sinabbat di desa Bangunrejo masih lazim terjadi, walaupun sistem upah juga ada. Sistem ini muncul karena kurangnya tenaga kerja dalam keluarga dan beratnya beban pekerjaan. Selain itu juga karena kurangnya modal untuk membayar upah buruh. Keanggotaan sabbat-sinabbat berkisar antara 8-15 orang. Mereka bergotong royong menggarap lahan pertanian sawah ataupun kebun-kebun rakyat. Hal ini biasanya dilakukan oleh petani yang mempunyai sawah tidak luas, sedangkan petani yang mempunyai sawah luas memakai tenaga kerja upah.

Di Bangunrejo tidak terdapat transmigran yang tidak memiliki tanah (Tabel. 25), walaupun di sana tidak tersedia tanah pecahan kepala keluarga. Ketidakterediaan tanah untuk pecahan kepala keluarga berkaitan dengan masalah pembagian lokasi transmigrasi tahun 1961-1965 yang belum terarah (Effendi, 1992).

Tabel 12 : Distribusi Pemilikan Tanah Transmigrasi
Generasi Kedua tahun 1990 di Bangunrejo

Luas Tanah (ha)	Prosentase Pemilik
0,0	0
0,01 – 0,49	23,1
0,50-0,99	23,1
1,00-1,99	30,7
> 2,00	23,1

Sumber : Syahrul Effendi, (1992).

Besarnya prosentase transmigran yang memiliki tanah lebih dari 2 ha disebabkan karena berkembangnya sistem peminjaman tanah pada penduduk asli, dan sistem sewa yang dapat terjadi pada tanah penduduk asli maupun tanah transmigran. Selain itu pada awal kedatangan transmigran diberi hak membuka tanah sisa setelah dibagi, yang masih berupa hutan. Misalnya, Sukasto selain memiliki tanah sawah pembagian seluas 2 ha, ia memiliki tanah lebih. Tanah itu didapat dari hasil membuka hutan sendiri.

Sistem pinjam tanah pada penduduk asli lebih banyak dilakukan oleh trasmigran di Bangunrejo, dan tanah itu digunakan untuk persawahan ataupun ladang. Sistem pinjam tanah adalah penyerahan sementara hak penguasaan tanah kepada orang lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemilik dengan peminjam. Si peminjam

dapat memanfaatkan tanah tersebut tanpa memberikan imbalan baik berupa uang maupun natura kepada pemilik.

Misalnya, Sarjo dan kawan-kawan yang berjumlah 10 orang pada tahun 1971 meminjam tanah ulayat penduduk asli. Mereka membuat perjanjian dengan seorang datuk yang bernama Majoindo dan kemudian mereka mendapatkan tanah dengan jalan membuka hutan sendiri. (Wawancara, Suharjo, 1999)

Dalam sistem sewa pemilik tanah memperoleh sejumlah uang atau natura dan penyewa berhak menggarap tanah sepenuhnya tanpa melibatkan pemilik tanah. Uang sewa biasanya dibayar dimuka, yaitu pada saat tanah diserahkan. Tanah yang disewa ada yang berasal dari transmigran yang memiliki tanah luas. Harga sewa tanah ditetapkan berdasar harga umum yang berlaku, tidak ada standar tertentu dalam menetapkan harga. Biasanya berdasar kesepakatan saja, misalnya pada tahun 1970-1980 harga sewa tanah sawah berkisar antara Rp.50.000- Rp.60.000 dan sewa tanah kering lebih murah antara Rp. 30.000-Rp. 40.000. (Wawancara, Tasman, 1999)

Sekitar 69% dari penduduk desa Bangunrejo bergerak dalam bidang pertanian (Tabel. 26), sedangkan 11% lainnya adalah buruh tani dan 20 % peternakan. Pendapatan transmigran masih bergantung pada kegiatan usaha tani. Sampai dengan tahun 1990 di Bangunrejo masih banyak rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu 46,15%, dihitung dari pendapatan per kapita setara beras: 38% pendapatan per kapita di bawah 320 kg dan 62% pendapatan per kapita di bawah 500 kg beras. (Effendi, 1992)

Tabel 13: Proporsi Sumbangan Beberapa Sumber Pendapatan Terhadap Pendapatan Total Desa Bangunrejo.

Bidang Usaha	Prosentase
Usaha Tani	
Padi	16
Palawija	40
Tanaman Keras	13
Ternak	20
Luar Usaha Tani	11

Sumber : Effendi, 1992.

Sampai dengan tahun 1980-an, perumahan penduduk belum ada yang permanen. Rumah-rumah ini juga belum ada yang mempunyai MCK sendiri. Mereka biasanya menggunakan sungai ataupun bandar untuk keperluan sehari-hari, sedangkan untuk minum mereka menggunakan air hujan (Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman, 1980). Alat penerangan rumah yang digunakan berupa lampu strongking, lampu dinding dan lampu gantung yang dinyalakan hanya sampai jam 24.00. (Wawancara, Sarjo, 1999)

Penyakit yang banyak menyerang penduduk adalah malaria, muntaber, cacar dan frambusia. Oleh karena lingkungan rumah tinggal yang tidak sehat sehingga sering berjangkit malaria dan penyakit paru-paru yang banyak membawa korban kematian. Fasilitas pengobatan yang ada di desa Bangunrejo berupa 1 Balai Pengobatan yang dipegang oleh seorang mantri dan 1 BKIA yang dilayani seorang bidan. Di samping itu terdapat 8 orang dukun beranak (Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman, 1980), walaupun tersedia bidan. Namun demikian, penduduk yang akan melahirkan lebih suka menggunakan jasa seorang dukun beranak daripada bidan. (Wawancara, Jasman, 1999)

3. Desa Baru

Kolonisasi orang Jawa di Pasaman sudah di mulai sekitar tahun 1935-an. Hal ini berkaitan dengan pengiriman tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di distrik-distrik Ophir. Pada tahun 1934 di Pasaman telah berdiri perkebunan kelapa sawit N.V. Cultuur Maatschappij Ophir (Perusahaan Perkebunan Ophir) yang terletak di kampung Kinali dan Lingkung Aur. Berdasarkan data wawancara Perusahaan Perkebunan Ophir pada tahun 1935 memiliki tenaga kerja 1.710 orang yang kebanyakan adalah orang Jawa (MvO, 1936). Perkebunan-perkebunan kelapa sawit ini baru berproduksi pada tahun 1941, tetapi kemudian terhenti dan diambil alih oleh pemerintah Jepang, terutama setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 (Hussein, 1991).

Selain kolonisasi buruh (arbeid-kolonisatie) yang antara lain dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit, pada tahun 1941 pemerintah Hindia Belanda juga membuka kolonisasi-pertanian (landbouw-kolonisatie) di daerah Batahan (Pasaman). Pada mulanya daerah Batahan dihuni terutama oleh orang-orang Mandahiling yang berasal dari Penyabungan Tapanuli dan Kota Nopan. Selain itu juga terdapat suku Tanjung yang berasal dari Kumpulan Minangkabau. Setiap mereka mendirikan perkampungan sendiri, misalnya orang Mandahiling yang berasal dari Pastap Kota Nopan mendirikan kampung yang dinamai Siduampan, perkampungan orang Minangkabau bernama Air Napal, sedangkan orang Mandahiling yang berasal dari

Gunung Tua Penyabungan mendirikan kampung Lubuk Gobing. (Monografi Kanagarian Batahan, 1977).

Pada masa Kolonial Belanda nagari Batahan terdiri dari kampung-kampung yang masing-masingnya dikepalai oleh penghulu dan berjumlah 18 orang. Menurut Indisch Gemeenschap Ordonnantie (IGO= Ordonansi Masyarakat Pribumi) tahun 1917 nagari Batahan merupakan satu nagari yang dikepalai oleh Kepala Nagari dan mempunyai Kerapatan Nagari, yaitu Kerapatan Adat Nagari Batahan (Monografi Kanagarian Batahan, 1977).

Pembukaan pemukiman baru ini di nagari Batahan untuk kolonisasi dari Jawa berdasarkan perundingan dengan penghulu setempat. (Bulletin Kolonisatie, 1941). Setelah mendapat ijin, pemerintah Kolonial Belanda pertama-tama mengadakan penelitian keadaan tanah di daerah Air Bangis dan dilakukan di tanah seluas 15.600 Ha, pada tahun 1937. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar tanah di daerah Air Bangis termasuk tanah *daciettu lateriet*, yang tua, kuning merah warnanya. Tanah ini bisa dipergunakan buat sawah dan tegalan (Bulletin kolonisatie, 1940). Agar hasil tanamannya baik, maka harus ditambahkan zat-zat makanan tanaman, terutama fosfat dengan air yang akan dialirkan atau dengan membajaknya.

Di sebelah barat daya Silaping (kira-kira 4.000 ha) merupakan tanah yang berbukit-bukit yang tidak bisa diairi, tetapi baik untuk dijadikan tegalan atau pekarangan, dan untuk dijadikan desa. Tanah yang sudah dikelola oleh penduduk asli terletak di sepanjang jalan Air Bangis-Silaping, tanah itu dipergunakan sebagai perladangan (Bulletin kolonisatie, 1940). Selebihnya daerah itu boleh dikatakan tidak didiami orang, sehingga tanah itu bisa dipergunakan untuk keperluan kolonisasi orang Jawa.

Berdasarkan penelitian itu, maka pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1941 memutuskan untuk membuka daerah baru untuk kolonisasi ; yaitu di daerah Batahan dekat pelabuhan Air Bangis. Persiapan pembukaan daerah kolonisasi sudah dimulai sejak bulan September 1940. Kemudian pada bulan Januari 1941 diberangkatkan kolonis yang pertama sebanyak 511 keluarga (Bulletin kolonisatie 1941). Kolonis pertama ini ditempatkan dekat kampung Baharoe dan pasir Panjang. Akan tetapi, tanah buat kolonis itu tidak dapat langsung dijadikan lahan persawahan. Mereka diberi tanah yang masih ditumbuhi hutan lebat dan juga dipenuhi tanaman salak-salak liar. Sedikit-demi sedikit, mereka membersihkan duri-duri salak dan menebangi pohon-pohon, yang besar kelilingnya 3-4 meter (Wawancara Samijan, 1999).

Sampai dengan tanggal 29 Januari 1941, keluarga yang berangkat mencapai 2.042 jiwa. Para kolonisasi berasal dari Residensi Kediri, dengan perincian : Kabupaten Kediri 363 kepala keluarga/1.366 jiwa, dan Kabupaten Tulung Agung 148 kepala keluarga/678 jiwa. (Bulletin Kolonisasi, 1941) Bantuan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda antara lain (Bulletin Kolonisasi, 1941):

a. Pemerintah menanggung pengangkutan kolonis ke daerah pemukiman baru.

b. Tiap kepala keluarga mendapat tanah $1\frac{1}{4}$ bau (2 ha).

Selain itu pemerintah juga membangun sebuah poliklinik di daerah kolonisasi, dan di sana ditempatkan seorang dokter dan 2 orang mantri. Di samping itu dibangun juga rumah untuk mantri. Poliklinik itu dapat merawat 30 orang sakit.

Pemerintah juga melakukan berbagai proyek untuk menanggulangi penyakit. Untuk mencegah bahaya penyakit malaria, pemerintah melakukan :

a. Pengeringan anak sungai yang mati di Batang Batahan (dekat Kampung Baru)

b. Tempat kolonisasi diberi saluran supaya air tidak tergenang.

c. Adanya perbaikan jalan antara Kampung Baru–Silaping dan menentukan batas-batas tanah antara tanah penduduk asli dan tanah untuk kolonisasi. (Bulletin Kolonisatie, 1941)

Desa Baru sebagai kolonisasi pertanian mulai terbentuk pada tahun 1941 dan diberi nama Purworejo. Dalam perkembangannya, desa Purworejo ini kemudian dipecah lagi menjadi 3 desa baru yaitu Mulyorejo, Sidomulyo dan Sukorejo. Pembentukan desa ini terjadi ketika datangnya rombongan transmigrasi berikutnya yaitu tahun 1954.

Rombongan pertama program kolonisasi berasal dari dua kabupaten, Kediri dan Tulungagung. Rombongan yang diberangkatkan ke Pasaman berasal dari berbagai desa di kabupaten Kediri dan Tulungagung, sehingga kebanyakan antar calon transmigran tidak saling mengenal. Mereka diberangkatkan naik bis menuju Kediri dan disambung dengan kereta api menuju Jakarta. Perjalanan Jakarta–Padang ditempuh dengan kapal laut sampai ke Air Bangis, dan disambung dengan naik truk menuju ke Gunung Tua. Oleh karena jalan dari Gunung Tua–Desa Baru belum bisa ditempuh mobil. Mereka berjalan kaki selama berjam-jam ke Desa Baru .

Di Desa Baru, mereka ditempatkan di bedeng-bedeng yang berada di hutan bernama Salak Laweh. Lahan yang disediakan untuk persawahan masih berupa hutan

rimba. Untuk melakukan pembukaan hutan, mereka dibagi dalam kelompok dan tiap kelompok beranggotakan 8 orang. Tiap hari mereka bekerja membuka hutan dan mendapat upah sebanyak 3 sen/per orang dan makan. Selain itu mereka juga diberi beras sebanyak 2 sukat/per kepala keluarga untuk satu minggu. Di samping membuka hutan, masing-masing orang juga secara bergantian bergotong royong membangun rumah tinggal.

Pengolahan lahan-lahan hutan yang sudah terbuka dilakukan secara bersama-sama oleh para transmigran. Pada awalnya, mereka menanam jagung. Pembukaan hutan sampai tanah tersebut menjadi lahan persawahan yang menghasilkan memakan waktu 1-2 tahun. Selama tinggal di kolonisasi mereka merasa kebutuhan makan keluarga tercukupi.

Mereka mengikuti program kolonisasi atas kemauan sendiri. Hal ini disebabkan karena kehidupan di daerah asal mereka miskin, tidak memiliki tanah dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun di daerah baru lahan yang diberikan masih berupa hutan mereka tidak kecewa karena terdorong oleh motivasi ingin mendapatkan tanah dan dapat makan kenyang. Tanah yang diberikan pun merupakan tanah yang cukup subur seperti yang dijanjikan pemerintah.

Kurang lebih satu tahun di daerah kolonisasi kehidupan berubah. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia dan menerapkan kebijaksanaan ekonomi perang. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan diambil alih dan di daerah kolonisasi Desa Baru dikerahkan tenaga kerja penduduk untuk membangun irigasi. Hal ini berkaitan dengan program Jepang membuat persawahan untuk dapat menghasilkan padi yang akan dipergunakan untuk logistik perang. (Husein, 1991)

Kehidupan di Desa Baru serasa berat karena penduduk diwajibkan kerja membangun saluran air, menggali tanah menembus gunung untuk dapat mengalirkan sungai Airmais ke Desa Baru. Mereka berangkat kerja jam 6 pagi dari rumah, berjalan kaki selama 2 jam ke tempat kerja. Pekerjaan berlangsung sampai jam 5 sore. Kesulitan makanpun terjadi, karena mereka bekerja tanpa dibayar dan tidak sempat lagi mengerjakan ladangnya. Kesulitan hidup masa itu digambarkannya “penduduk banyak yang hanya makan pucuk rebung ataupun bonggol pisang”.

Kualitas hidup transmigran menurun bila dibandingkan dengan kehidupan mereka di tahun 1941. Lahan persawahan banyak yang terbengkalai, hampir setiap hari ada penduduk yang meninggal karena kelaparan. Mereka jauh dari kehidupan politik sehingga setelah Indonesia merdeka dan masa Revolusi kemerdekaan mereka tidak

tahu. Mereka hanya tahu kehidupan sulit dan di antara mereka banyak yang meninggal, meninggalkan desa untuk mencari makan ke desa tetangga, ataupun pulang ke Jawa. Oleh karena itu, pada tahun 1949 di Desa Baru diperkirakan hanya tinggal 15 kepala keluarga yang dapat bertahan.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1954-1956 Desa Baru kembali kedatangan transmigrasi. Transmigran ini berasal dari berbagai tempat di pulau Jawa seperti dari Daerah Istimewa Yogyakarta (42 kk/1954), Jawa Timur (61 kk/1955), Jawa Barat (63/1956) dan Jawa Tengah (27 kk/1956). Transmigran yang baru datang ini ditempatkan di kolonisasi Desa Baru (Sumatera Tengah Membangun, 1955).

Transmigran yang pergi ketika masa-masa sulit ada juga kemudian kembali ke Desa Baru. Mereka ini ditempatkan pada desa Sukorejo, sebuah pemukiman baru. Desa ini merupakan pecahan dari desa Purworejo. Transmigran yang datang antara tahun 1954-1956 ini menempati tanah-tanah yang ditinggalkan oleh transmigran yang datang tahun 1941. Penempatan transmigran ini ditentukan oleh pemerintah melalui sistem lotere. Dengan didatangkannya transmigran sebanyak 193kk/ 805 jiwa (Sumatera Tengah Membangun, 1955) kehidupan masyarakat di Desa Baru mulai bersemi kembali.

Kesulitan-kesulitan yang terjadi pada awal kedatangan. Pertama, tanah yang diberikan pemerintah seluas 2 ha, hanya $\frac{1}{4}$ ha saja yang telah terbuka untuk lahan pekarangan dan bangunan rumah, sedangkan lahan perkebunan dan persawahan seluas $\frac{13}{4}$ ha masih berupa hutan dan mereka harus membuka sendiri. Kedua, pemberian beras dan lauk-pauk hanya selama 6 bulan, pada hal dalam perjanjian akan diberikan selama satu tahun. Pada saat bantuan pemerintah sudah habis, lahan persawahan mereka masih belum dapat menghasilkan secara baik. Kemudian para transmigran meminta pada Jawatan Transmigrasi tambahan bantuan beras dan lauk untuk setahun lagi. Bantuan inilah yang dijadikan sebagai modal untuk dapat bertahan hidup oleh para transmigran itu.

Pada tahun-tahun pertama kedatangan, mereka hanya dapat bertanam di tanah pekarangan masing-masing dengan tanaman jagung, ubi kayu, pisang. Ancaman yang terutama bagi petani saat itu adalah hama babi. Belum sampai mereka dapat menikmati hasilnya, tanaman mereka telah habis dimakan babi hutan. Kemudian karena situasi lingkungan tempat tinggal para transmigran yang masih banyak hutan belantara, berawa-rawa mengakibatkan seringnya berjangkit penyakit malaria. Untuk menangani

masalah kesehatan peserta transmigrasi, pemerintah menyertakan seorang mantri dan seorang bidan yang

dibekali dengan obat-obatan terutama pil kina untuk penyakit malaria, tetapi para transmigran banyak yang tidak memanfaatkannya, karena mereka lebih suka berobat secara tradisional.

Oleh karena program transmigrasi masa Orde Lama masih mengutamakan pertanian (Ramadhan, 1993), maka berbagai percobaan berbagai jenis tanaman dilakukan di Desa Baru. Mereka melakukannya di bawah bimbingan seorang penyuluh pertanian. Hasil percobaan ini terlihat bahwa pada tahun 1955 di Desa Baru telah ada berbagai tanam-tanaman, seperti kacang-kacangan, tembakau, lada dan tebu. (Tabel. 7)

Tabel 14 Penggunaan Tanah di Desa Baru Tahun 1955

Luas Tanah (Ha)	Jenis Tanaman
42,15	Padi
1	Kacang Tanah
1	Kacang Kedele
1	Kacang Hijau
1	Singkong
12	Jagung
5	Tembakau
1	Ubi Jalar
1	Tebu
2	Lada
2	Kopi
885 batang	Kelapa

Sumber : Sumatera Tengah Membangun (1955).

Semua bibit ini disediakan oleh pemerintah. Dari berbagai jenis tanaman yang dicobakan, hanya jenis tanaman kacang-kacangan, singkong, jagung, ubi jalar dan kelapa yang berhasil dikembangkan di Desa Baru. Dalam penantian sampai sawah mereka menghasilkan, mereka bekerja di kampung penduduk asli, seperti Tamiang

Batahan, Kampung Mesjid. Mereka bekerja mencangkul, menggali bandar, dan upah yang diberikan dalam bentuk natura, satu minggu kerja mereka mendapat 5-6 sukat beras. Pada minggu berikutnya mereka bekerja di ladang sendiri. Model lain untuk menambah penghasilan antara lain dengan mengumpulkan hasil hutan. Mereka memotong kayu di hutan untuk dibuat papan sebagai bahan bangunan rumah. Papan-papan ini dijual ke desa-desa sekitar.

Kesulitan lain yang dialami transmigran, yaitu pada saat tanaman telah menghasilkan. Mereka tidak dapat memasarkan hasil pertaniannya karena tidak ada sarana angkutan mobil antara Desa Baru dengan Air Bangis yang merupakan pasar yang terbesar di daerah Batahan. Hal ini disebabkan jalan dari Desa Baru ke kampung-kampung sekitar masih berupa jalan tanah yang belum dikeraskan dan becek di waktu hujan. Mereka biasanya menjual hasil pertaniannya ke pasar terdekat, seperti Gunung Tua dengan menggunakan alat angkut seperti, sepeda ataupun pedati dan dengan jarak tempuh antara 3 sampai 4 jam.

Memasuki tahun 1960an lahan persawahan mereka telah mulai menghasilkan juga tanaman di pekarangan rumah, walaupun masih mengalami hambatan dalam pemasaran hasil pertanian. Di Desa Baru sampai 1960an masih belum ada sekolah, sehingga bila orang tua akan menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat, mereka harus mengirim anaknya ke kampung terdekat yang telah ada Sekolah Rakyat seperti, Gunung Tua. Oleh karena itu, tingkat pendidikan anak-anak peserta transmigrasi yang datang antara tahun 1954-1956 masih termasuk rendah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat dikatakan bahwa, rata-rata anak transmigran hanya tamat SR untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuan hampir tidak pernah ada yang bersekolah. Hal ini masih lebih baik dibanding dengan anak-anak transmigran yang datang tahun 1941, mereka tidak pernah bersekolah. Keteringgalan mereka dalam bidang pendidikan disebabkan karena faktor tidak adanya sekolah di Desa Baru juga disebabkan keadaan politik waktu itu yang tidak menentu.

Pertambahan penduduk tidak banyak, karena tingkat kematian balita cukup tinggi dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden didapatkan data bahwa rata-rata penduduk Desa Baru mempunyai anak lebih dari 6 orang. Misalnya, Maris mempunyai anak 9 orang, dan Rasikem mempunyai 14 orang anak tetapi yang hidup hanya 9 orang. Untuk menangani kelahiran bayi biasanya dilakukan oleh seorang dukun bayi, walaupun di sana terdapat seorang bidan.

Bila dilihat dari sarana kebersihan, Desa Baru masih dapat dikatakan belum memenuhi syarat kesehatan. Oleh karena kamar mandi yang tidak memiliki saluran pembuangan dan belum adanya kakus. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari mereka telah mempunyai sumur di masing-masing rumahnya. Akan tetapi pada rumah mereka tidak dilengkapi dengan kakus. Biasanya mereka membuang hajat di kebun yang ada di belakang rumah dengan sistem timbun. Di Desa Baru sampai tahun 1960an masih belum ada listrik, sehingga untuk penerangan rumah mereka menggunakan lampu minyak.

Kehidupan yang telah dimulai kembali terusik dengan adanya pergolakan daerah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Tengah yang dimulai sejak 15 Februari 1958. Pemberontakan PRRI ini berimbas pula ke desa transmigrasi Jawa Desa Baru. Pada saat tentara pusat masuk ke Sumatera Barat, pasukan PRRI melakukan perang gerilya di pedalaman Minangkabau, memaksa masyarakat langsung ataupun tidak langsung terlibat. (Nopriyasman, 1988) Sentimen anti Jawa menjadikan terjadinya penyerangan ke desa-desa transmigrasi Jawa di Sumatera Barat. Pemuda-pemuda di Desa Baru banyak yang melarikan diri ke hutan-hutan, sedangkan kaum wanita tetap tinggal di kampung. Jika malam tiba, para kaum wanita bergabung tinggal bersama di satu rumah. Kadangkala gerombolan PRRI ini masuk ke Desa Baru dan mereka mengambil bahan makanan yang ada, juga ternak penduduk. Setelah itu, mereka pergi kembali.

Tahun 1960-1966 merupakan tahun yang penuh pergolakan politik. Pergolakan pertama dari PRRI dan kemudian meletus G 30 S/PKI tahun 1965. Kedua pergolakan ini membawa dampak terhadap penduduk warga Desa Baru yang terkena wajib lapor, terutama kelompok pemudanya.

Menurut hasil wawancara kehidupan di Desa Baru, kondisi sudah mulai membaik kembali sejak tahun 1970-an. Sampai tahun 1980, jumlah kepala keluarga di Desa Baru telah mencapai 899 kk/4279 jiwa, dan Mulyorejo merupakan desa yang terkecil, namun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi

Bila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk, Desa Baru termasuk masih rendah. Oleh karena pada tahun 1980, di tiap desa hanya memiliki SD, sedangkan anak usia sekolah mencapai 200-an anak. (Tabel 9). Tiap SD mempunyai 6 ruang kelas dengan jumlah guru 17 orang untuk 3 SD. Keadaan gedung SD hanya SD di Mulyorejo

yang dalam kondisi baik, sedangkan dua bangunan SD lainnya yang terdapat di Sidomulyo, dan Sukorejo dalam keadaan rusak ringan.

Dengan jumlah penduduk yang sudah mencapai 4279 orang itu, di Desa Baru hanya mempunyai 1 buah Puskesmas. Puskesmas itu terletak di desa Sidomulyo. Kesadaran penduduk untuk pergi ke dokter juga masih rendah, hal ini dapat dilihat dari data kunjungan ke Puskesmas, rata-rata 1 orang/hari. (Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman, 1980). Selain itu fasilitas kesehatan yang ada antara lain 1 Pos Keluarga Berencana.

Sampai tahun 1980an, rumah tempat tinggal mereka hanya memiliki sumur yang berfungsi untuk mandi dan cuci. Akan tetapi tanpa memiliki saluran pembuangan air, sehingga air menggenang. Rumah tinggal tidak memiliki jamban, biasanya mereka membuang hajat di kebun yang berada di belakang rumah dengan sistim timbun.

Keseluruhan penduduk Desa Baru beragama Islam. Sarana peribadatan yang dimiliki, tiap desa mempunyai masing-masing 2 buah masjid dan sebuah langgar. Sarana pasar hanya ada di Mulyorejo yang menampung semua pedagang dari seluruh Desa Baru. Pasar ini dibangun tanpa menggunakan bahan bangunan yang permanen.

Sarana jalan yang ada masih berupa jalan tanah yang belum diperkeras. Hanya jalan di Mulyorejo, yang terletak pada jalan masuk ke Desa Baru, yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat. Untuk masuk ke desa Sidomulyo dan Sukorejo sarana angkutan yang digunakan sepeda ataupun sepeda motor. Sampai tahun 1980 di Desa Baru sudah terdapat 21 sepeda motor, dengan perincian sebagai berikut: Sidomulyo (7buah), Sukorejo (4 buah) dan Mulyorejo (10 buah). (Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman, 1980).

Sampai dengan tahun 1980 listrik belum masuk ke Desa Baru, tetapi mereka telah mempunyai sarana komunikasi dengan dunia luar, yaitu radio. Pada tahun 1980 di Desa Baru telah ada 190 buah pesawat radio dengan kepemilikan terbanyak 80 buah di desa Mulyorejo.

Mata pencaharian penduduk yang terutama adalah bertani. Mereka menggunakan pola irigasi sederhana dan sawah non irigasi (Tabel. 10)

Tabel 15 Pemakaian Tanah di Desa Baru tahun 1980 (ha)

	Nama desa	Tegalan	Kebun Rakyat	Sawah Irigasi	Sawah non irigasi
	Sidomulyo	10	25	40	485

	Sukorejo	500	450	150	350
	Mulyorejo	25	25	10	80

Sumber : Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman (1980).

Selain ditanam diperkebunan, di Desa Baru tanaman coklat, kulit manis juga ditanam di pekarangan rumah mereka. Tanaman ini berfungsi sebagai tanaman penghuni lahan kosong. Petani-petani di Desa Baru juga memiliki lahan persawahan. Lokasi sawah ini umumnya terletak lebih kurang 10-15 meter di belakang rumah penduduk. Setiap tahun mereka mengalami masa paceklik yaitu masa diantara penanaman padi berikutnya. Pada masa paceklik ini, mereka biasanya bekerja di kebun coklat atau mencari kerja sebagai buruh di luar desa mereka.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa transmigran di Desa Baru pada saat itu rata-rata telah memiliki rumah papan yang dibangun secara gotong royong. Hasil panen sawah mereka rata-rata per hektar 1-2 ton. Misalnya, Pipit memiliki sawah 17 panceng (sekitar $\frac{1}{2}$ ha) dapat menghasilkan padi gabah sekitar 90-150 kaleng (1 kaleng=12 kg padi gabah), sawahnya dapat dipanen dalam waktu 5 bulan. Selain bertani mereka juga beternak ayam, tik. Ternak sapi juga ada dikembangkan yang berasal dari sapi Banpres.

Bila dilihat dari penghasilan sawah mereka, mereka tidak dapat dikatakan miskin., tetapi dilihat dari faktor sarana kesehatan, sarana tempat tinggal, pendidikan mereka tidak dapat dikatakan kaya. Keberhasilan tanaman padi di sawah tidak selalu sama tiap tahunnya, karena sering terserang hama, terutama hama babi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Mulyorejo, ia menyatakan bahwa dari tiga desa di Desa Baru, penduduk yang menggunakan sistem peminjaman tanah, ternyata yang paling banyak adalah desa Mulyorejo. Hal ini terjadi karena bila dilihat dari perbandingan luas wilayah antara Mulyorejo dengan Sidomulyo, wilayah Sidomulyo lebih luas. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah , kedua desa ini memiliki jumlah penduduk yang hampir sama (Tabel II).

Tabel 16 Perbandingan Jumlah Penduduk di Sidomulyo, Sukorejo, dan Mulyorejo Tahun 1980 dan 1997

Desa	Luas	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Jiwa
------	------	---------------------	-------------

	Wilayah Km ²	1980	1997	1980	1997
Sidomulyo	20,64	230	357	111	1876
Sukorejo	23,82	355	381	733	2173
Mulyorejo	11,25	315	393	435	1708

Sumber : Data Potensi Desa Kabupaten Pasaman (1980) dan Kecamatan Sungai Beremas Dalam Angka (1997).

Di Sukorejo terdapat perkebunan rakyat. Bentuk perkebunan ini tidaklah terlalu luas. Selain dari tanahnya sendiri, mereka juga ada yang menyewa tanah dari penduduk sekitarnya seperti di Silaping. Tanaman yang dikembangkan dalam perkebunan rakyat diantaranya adalah karet, dan kayu manis.

Sulit untuk menentukan berapa pendapatan mereka dari hasil usaha tani, karena tidak dijumpai penduduk yang pernah menghitung pendapatan mereka. Akan tetapi menurut perkiraan beberapa petani yang diwawancarai, hasil panen tersebut hanya cukup untuk menambah lauk dan menyisahkan sedikit sebagai bibit. Pada tahun 1984 setelah dibangunnya irigasi sungai Batahan, maka produksi padi penduduk meningkat dari 1-2 ton menjadi 3-4 ton/ha. Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu sekitar tahun 1989 penduduk mulai tertarik menanam kedelai karena pada waktu itu harganya mencapai Rp. 650/kg di pasaran Sumatera Barat. Pada tahun 1994 penduduk mulai mengembangkan tanaman kelapa sawit. Akan tetapi masih belum terlihat hasilnya sampai pada penelitian ini dilangsungkan karena tanaman belum menghasilkan.

Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian pada desa-desa transmigrasi seperti Desa Baru, Tongar dan Kinali, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dan pelaksanaan program transmigrasi pada berbagai periode untuk Desa Baru dan Desa Bangunrejo terlihat telah berperan dalam mengentaskan para transmigrasi dari kemiskinan. Akan tetapi untuk Desa Tongar persoalannya lain, desa ini mengalami keterbelakangan akibat ditinggalkan penduduknya. Program pengentasan kemiskinan di Koto Gadang Jaya belum berjalan baik.
2. Keberhasilan dan ketidak berhasilan program transmigrasi dapat dilihat juga dari aspek kepemilikan lahan dan hasil pendapatan yang diperoleh mereka. Luas lahan

yang dimiliki dengan lahan yang digarap oleh transmigran kebanyakan desa tidak seimbang karena makin kecilnya jumlah tanah yang dapat dibagikan. Selain itu karena faktor alam, yaitu banyak lahan yang tergolong tidak subur. Hal ini berakibat pada pendapatan yang diterima oleh transmigran, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

3. Bila dilihat dari sisi pendidikan dari keturunan warga transmigrasi, transmigrasi dapat meningkatkan pendidikan keturunan mereka. Misalnya, di Desa Baru pendidikan mengalami kemajuan, terutama untuk Desa Sidomulyo dan Mulyorejo yang dapat dikatakan perkembangannya lebih maju bila dibandingkan dengan Desa Sukorejo. Oleh karena di Sidomulyo dan Mulyorejo penduduknya sudah banyak yang mencapai tingkat perguruan tinggi. Untuk desa Tongar, pendidikan sudah mengalami kemajuan pula, walaupun penduduknya telah banyak yang pergi meninggalkan desa Tongar, sedangkan perkembangan pendidikan di Kinali, seperti di desa Bangunrejo dan Koto Gadang Jaya belum mengalami kemajuan. Kebanyakan mereka lebih mementingkan bekerja untuk mendapatkan uang dibandingkan pergi sekolah.
4. Perbaikan kualitas hidup dapat dilihat dalam hal perbaikan Pelayanan Umum dan Kebutuhan Dasar baik di Desa Baru, Tongar dan Kinali, kemajuan yang mencolok terlihat di Tongar dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti air bersih, listrik dan saluran air yang baik, sedangkan di Desa Baru, Bangunrejo dan Koto Gadang Jaya dapat dikatakan masih kurang memenuhi syarat kesehatan, seperti tidak adanya saluran air pembuangan yang baik, dan masih banyak transmigran membuang hajat di sembarang tempat, air masih dibiarkan tergenang di sana sini.
5. Kemiskinan yang masih terdapat di desa transmigrasi dalam penelitian ini tidak berlaku secara terus menerus. Pada suatu periode tertentu, mereka mengalami kehidupan yang baik, kehidupan akan menurun bila terjadi ketidak stabilan politik di Indonesia. Kebanyakan dari mereka baru merasakan ketenangan hidup sejak tahun 1970-an dan dengan diiringi perbaikan kualitas hidup.
6. Tingkat kesejahteraan seperti yang diharapkan dari program transmigrasi belum mencakup pada seluruh masyarakat transmigran. Berdasarkan ukuran tingkat kemiskinan yang dikemukakan Sayogo, pada desa penelitian terlihat presentase keluarga miskin tidak sama di tiap unit pemukiman transmigrasi.

Presentase rumah tangga yang masih berada di bawah garis kemiskinan, di Desa Baru sekitar 9% (108 KK) dari jumlah rumah tangga yang ada, sedangkan di Tongar terdapat 15% (30KK) rumah tangga, dan di Kinali terdapat 24% rumah tangga dengan ketentuan 4% (13 KK) di Bangunrejo dan 20% (54 KK) di Kotogadang jaya..

5.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Oleh karena luasnya tanah yang belum digarap dan jarang penduduk, sistem peminjaman tanah masih dapat menunjang perluasan kebun transmigrasi. Akan tetapi untuk masa selanjutnya pada saat lahan terbatas pendapatan mereka akan menurun. Untuk itu perlu kegiatan penyuluhan pertanian untuk memperkenalkan teknologi pertanian.
2. Usaha agro industri, seperti perkebunan kelapa sawit sangat membantu transmigrasi untuk mendapatkan kerja tambahan. Akan tetapi pembukaan perkebunan diminta agar memperhatikan kepemilikan tanah masyarakat. Para pengembang perkebunan sistem PIR diharapkan untuk ikut serta memikirkan peluang kerja bagi warga transmigrasi yang mengikut sertakan tanahnya pada saat kebun belum menghasilkan.
3. Kebijakan pemerintah di harapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mampu mendorong pertumbuhan desa transmigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

I. ARSIP

Algemeen Memorie betrende de onderafdeling ophir, ofdeling Agam, **10 Oktober 1936**

Buku data edisi Nopember, Departemen Transmigrasi & Pemukiman dan Perambah Hutan Republik Indonesia, **Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat.**

Buletin Kolonisatie No. **I-II**, Batavia : Landsdrukerij, **1938-1941**

Data UPT Serah Pra Pelita **sampai dengan tahun ke III Pelita VI**

Monografi Desa Baru **tahun 1997**

Monografi Kabupaten Pasaman, **1980-1990**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 thun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi.

Verslag van het centraal kolonisatie comite (CKC) **Buitenzorg ; 1932.**

Koloniale Studien **tahun 1918**

Transkopemada **(1960-1962)**

Sumatera Tengah **(1953-1955)**

II. ARTIKEL DAN BUKU

- Abdullah .T. 1982.** Disekitar Pencarian dan Pencarian Sejarah Lisan. **Lembaran Sejarah Lisan Nomor 2 Oktober 1982.**
- Adiratma. E.R. 1993.** **Pengentasan Kemiskinan Absolut.** **Harian Suara Karya tanggal 9 Juni**
- Affandi. A. 1986.** **Pembangunan Pertanian Indonesia.** **Departemen Pertanian Jakarta.**
- Ajit G dan K. Griffin. 1981** **Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan.** **Liberty. Yogyakarta**
- Anton. N. 1989.** **Kelembagaan Petani Plasma PIR-BUN/Transmigrasi Pasca Konversi.** **Makalah Lokakarya. PERAB/PERHEB/HIPMI Bogor.**
- Arif. S. 1960.** **UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan Beberapa Masalah Hutan Agraria, Hukum Tanah.** **Pustaka Tinta Mas, Surabaya**
- Asfarizal. 1996.** **Sejarah Kelapa sawit Qphir di Pasaman Sumatera Barat.** **F. Sastra Unand. Padang.**
- Asnawi. S. 1974.** **Beberapa Usaha yang Perlu untuk Pengentasan Kemiskinan Petani di Desa Tertinggal Sumatera Barat.** **Seminar tentang Pengentasan Kemiskinan, Melalui peningkatan Sumberdaya Manusia. KORAL UP-ISPALOKANTEHSUT Sumatera Barat 15 Desember. Padang.**
- _____. **1993.** **Aspek Sosial Ekonomi dalam Pelaksanaan IDT di Sumatera Barat.** **Makalah Seminar dan Kongres Ikatan Alumni Unand. Padang.**
- _____. **1994.** **Masalah Kemiskinan di Pedesaan dan Strategi Penaggulangannya, Seminar Sosial Budaya Mengentaskan Kemiskinan, Kelompok Kerja Panitia Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat.** **Kerjasama dengan Universitas Bung Hatta.**
- Aziz. M.A. dan Nugroho S.S. 1985.** **Pengelolaan Lahan Usaha II Petani Transmigrasi sebagai Salah Satu Sarana Peningkatan Pendapatan.** **Dalam Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 . UI. Jakarta**
- BPS. 1992.** **Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia 1976-1990.** **BPS Jakarta.**
- Booth. A. 1988.** **Sejarah Ekonomi Indonesia.** **LP3ES. Jakarta.**
- Bremen. J. 1986.** **Pengusaan Tanah dan Tenaga Kerja.** **LP3ES. Jakarta.**
- Burger D.H. 1962.** **Sejarah Ekonomi Sosiologi Indonesia. Jilid 1.2. Pradjamarmita. Djakarta.**

- Carner. G. 1988.** Kelangsungan Hidup, Saling Ketergantungan dan Persaingan di Kalangan Kaum Miskin di Philipina. Dalam David Corten dan Sjahrir (ed) **Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.**
- Chambers.R, 1987.** Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. **LP3ES. Jakarta.**
- Collier. W.L. 1980.** Lima Puluh Tahun Transmigrasi Spontan dan Transmigrasi Pemerintah di Tanah Berawa Kalimantan. Dalam Prisma No. 5 Mei LP3ES. **Jakarta..**
- Departemen Transmigrasi. 1984.** Kriteria Tingkat Perkembangan/ Keberhasilan Minimal Unit Pemukiman Transmigrasi.
- Departemen Transmigrasi. Dan LEKNAS-LIPI. 1978.** Resume Beberapa Hasil Penelitian Transmigrasi di Indonesia 1977-1978.
- Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia, **1994.** **Pedoman Penyelenggaraan Transmigrasi Swakarsa Mandiri, Jakarta.**
- Effendi, N. 1993** Sumberdaya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan. **Gajah Mada. Yogyakarta.**
- Esmara Hendra. 1986.** Perencanaan dan Pengembangan Kemiskinan di Indonesia. **Gramedia. Jakarta.**
- Fachrurozie, S.A. dan Collins Mae Andrews, 1977.** Buiyng Time : Forty years of Transmigration in Belitang, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol XVI No. 3.
- Geertz. C. 1976.** Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia di Indonesia. **Bharata Karya Aksara, Jakarta.**
- Guinnes.P. 1977.** Transmigrants in South Kalimantan and South Sulawesi ; Inter Island Government Sponsored Migration in Indonesia. **Population Institute Gajah Mada University. Yogyakarta.**
- Hansen, GE. 1981.** Agricultural and Rural Development in Indonesia. **Westview Press. Colorado.**
- Hardjono.J. 1982.** Transmigrasi dari Kolonial sampai Swakarsa. **Grramedia. Jakarta.**
- Hardjosudarmo.S. 1965.** Kebijakan Transmigrasi. **Bharata. Jakarta.**
- Hayami dan Kikuchi. 1987.** Dilema Ekonomi Desa. **YOI. Jakarta.**
- Heeren. H.J. 1979.** Transmigrasi di Indonesia. **Gramedia. Jakarta.**
- Hermanto, F. 1980.** Ilmu Usaha Tani, Bagian Agribisnis dan Koperasi. **Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB. Bogor.**

- Heyzer. N. 1986.** Women Migration and Income Generation, dalam Working Women in South East Asia. **Open University Milton Keynes.**
- Heru. Y. 1996.** Kebijakan Pemerintah Terhadap Perkebunan Karet Sumatera. **Unand. Padang.**
- Hugo. G.J. 1981.** Population Mobility in West Java. **Second editon. Gajah Mada University Press. Jogjakarta.**
- Jazairy.I. et al 1992.** The State of World Rural Poverty : An Inquiri into its Causes and Consequences. **New York University Press. New York.**
- Kanwil Transmigrasi Daerah Tk I Sumatera Barat, 1993.** Laporan Perkembangan Transmigrasi di Sumatera Barat Bulan September 1993, **Kantor Wilayah Pripinsi Sumatera Barat.**
- Kartasasmita. G. 1996.** Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, **PT. Pustaka Cidesendo, Jakarta.**
- Korten D. dan Sjahrir (ed). 1988.** Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. **Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.**
- Koriun H.B. 1999.** Perkampungan Suriname: Studi tentang Repatriation Suriname di Tongar (1954-1993) **Fak. Sastra Unand Padang.**
- Kuntowidjojo, 1993.** Metodologi Sejarah, **Tiara Wacana. Yogyakarta.**
- Leeden, Cornelis Bastian Vander. 1952.** Het Aspect van Landbouw Kolonisatie, **Tesis Rijks Universiteit se Leiden.**
- Mansur. MD. 1970.** Sedjarah Minangkabau, **Bharata. Djakarta**
- Mariel.O. 1986.** Transmigrasi : Myth and Realities Indonesian Resettlement Policy 1965-1985, **IEGIA Document No. 57. Copenhagen.**
- Moleong L. 1993.** Metode Penelitian Kualitatif, **Remaja Rosda, Bandung.**
- Mosher, AT. 1991.** Menggerakkan dan Membangun Pertanian, **CV. Yasaguna, Jakarta.**
- Mubyarto. 1983.** Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. **Sinar Harapan. Jakarta.**
- _____. **1992.** Tanah dan Tenaga Kerja Kajian Sosial Ekonomi. **Adtya Media. Yogyakarta.**
- _____. **1993.** Profil Desa Tertinggal di Indonesia. **Sinar Harapan. Jakarta.**
- Naim M. 1968.** Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau. **Sri Darma NV. Padang.**

- Nazir M.** Metode Penelitian. **Ghalia Indonesia. Jakarta.**
- Penny. DH. 1990.** Kemiskinan Peranan Sistem Pasar. **UI. Jakarta.**
- Prayitno. M.M. 1987.** Petani Desa dan Kemiskinan **BPFK. Jakarta**
- Pronk. J.P. 1993.** Sedunia Perbedaan. **Yayasan Obor Indonesia. Jakarta**
- Rangkuti., Parlaungan A,** Teknologi Tepat Guna Bagi daerah Transmigrasi dalam YTKI/FES, 1980. Pemantapan Usaha Pembangunan di Daerah Transmigrasi, **Pusat Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSM), Jakarta.**
- Rhoda. RE. 1980.** Development Activities and Rural Urban Migration. **Development Miqest. Vol. VIII Nomor 4 Oktober 1980.**
- Rusli. S. 1996.** Pembangunan dan Fenomena Kemiskinan Fakultas Pertanian **IPB-Bogor.**
- Salim. E 1976.** Perencanaan Pembangunan dan Pemerintahan Pendapatan. **UI. Jakarta**
- Sajogyo, 1977.** Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan. **LPSP-IPB. Bogor.**
- Sajogyo, 1996,** Memahami dan Menganggulangi Kemiskinan di Indonesia, **Grasindo. Jakarta.**
- Scott. J. 1989.** Moral Ekonomi Petani. **LPSES. Jakarta.**
- _____, **2000.** Senjatanya Orang-orang Kalah. **Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.**
- Sediono. 1983.** Dilema Petani Blasma. **Akatiga. Bandung**
- Sitompul. 1981.** Pengembangan Perkebunan Rakyat Pola PIR. **Ditjenbun. Jakarta**
- Soeharyo. A. dan T. Patong, 1973.** Sendi-sendi Pokok Ilmu Usaha Tani, Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi. **Fak Pertanian IPB Bogor.**
- Soekartawi. 1996.** Pembangunan Pertanian. **Graffindi Persada. Jakarta**
- Suharso, 1978.** Pola Perpindahan penduduk dan Urbanisasi di Jawa Tahun 1968-1973, Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Proses Terjadinya. **Universitas Gajahmada. Yogyakarta.**
- Swasono S.E.1985.** Sepuluh Windu Transmigrasi di Indonesia 1905-1985 **Universitas Indonesia. Jakarta.**